

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO HIDUP	iv
RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Kegunaan Penelitian.....	15
1. Kegunaan Teoritis	15
2. Kegunaan Praktis	16
E. Kerangka Pemikiran.....	16
1. Teori Ilmu Perundang-undangan.....	16
2. Teori Hukum Hak Asasi Manusia.....	18
F. Langkah-Langkah Penelitian	19
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Jenis Pendekatan	20
3. Sumber dan Jenis Data	21
4. Teknik Pengumpulan Data.....	23
5. Analisis Data	24

**BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 CORONA VIRUS
DISEASE BALIKPAPAN YANG TERTUANG DIDALA SURAT EDARAN
WALIKOTA BALIKPAPAN NOMOR: 300/3128/PEM. 25**

A. Tinjauan Umum Tentang Ilmu Perundang-Undangan.....	25
1. Pengertian Ilmu Perundang-Undangan	25
2. Teori Pembentukan Undang-Undang.....	28
3. Materi Muatan dan Asas-Asas Perundang-Undangan	31
4. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	35
5. Fungsi Peraturan Perundang-undangan.....	37
6. Fungsi Internal	39
7. Fungsi Eksternal.....	44
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Hak Asasi Manusia	45
1. Konsepsi Hak Asasi Manusia.....	45
2. Pengertian Hak Asasi Manusia	50
3. Pengelompokan Hak Asasi Manusia.....	54
4. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia	56
5. Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum	58

BAB III PEMBAHASAN 62

A. Kedudukan Surat Edaran Walikota Balikpapan Nomor: 300/2697/PEM. Tentang Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 <i>Corona Virus Disease</i> 2019 Di Wilayah Kota Balikpapan....	62
1. Kedudukan Surat Edaran Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Dalam Tatanan Hukum Indonesia.....	62
2. Kekuatan Hukum Surat Edaran Walikota Balikpapan Nomor: 300/3128/PEM. Tentang Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan	

Kegiatan Masyarakat Level 4 <i>Corona Virus Disease</i> 2019 Terhadap Pelaku UMKM Di Kota Balikpapan	68
3. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Yang Mengalami Dampak Kerugian Akibat Surat Edaran Nomor: 300/3128/ PEM.	87
4. Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Kesejahteraan Sosial Terhadap Pelaku UMKM	90
5. Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Terhadap Pelaku UMKM .	92
6. Perlindungan Hukum Pelaku UMKM Menurut Pandangan Hukum Hak Asasi Manusia	94
BAB IV PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	100

